PORTFOLIO DATA DOSEN

Program Studi S1 Ilmu Hukum - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Dr. Kartika Widya Utama, S.H., M.H.

NIP. 198904082014041001

BIDANG KEPAKARAN / PENGAJARAN

- Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Hukum Acara Tata Usaha Negara, Kemahiran Litigasi, Pengantar Hukum Indonesia

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen FH Undip

PENGALAMAN KERJA SAMA INDUSTRI (5 THN TERAKHIR)

Tim Ahli / Konsultan Universitas Diponegoro Fakultas Hukum

PATEN / HAK CIPTA

-

KEANGGOTAAN FORUM ORGANISASI KEAHLIAN

ADHAPER

ID & Profil Pengindeks Akademik:

PDDikti: Terdaftar | SINTA: 6714360 | Scopus: 57218895864 | Scholar: g0c6ujMAAAAJ | ORCID: -

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana Hukum (S.H.) Undip 2007-2011
2. Magister Ilmu Hukum (M.H) Undip 2011-2012
3. Doktor Hukum (Dr) Undip Lulus 2024

Penelitian

- Resolution of Disputes on Illegal Acts by the Authorities in Indonesia.
- Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara
- Verifikasi Manual Manifestasi Asas Kecermatan Sebagai Batu Uji Terhadap Keputuan Tata Usaha Negara
- Environmental protection barriers in Indonesia in the form of Administrative Effort
- EKSISTENSI GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- Harmonizing the Rules: “A Socio-Legal Analysis of FIFA Stadium Safety and Security Standards and Indonesian Football Regulations – Aftermath Kanjuruhan Tragedy"
- Good Governance Principle sebagai Pedoman Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara

Pengabdian Kepada Masyarakat

- PKM II Sosialisasi Lembaga Peradilan Di Indonesia dan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat Di Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung
- Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap 1 Sosialisasi Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat Di Desa Desa Koripandriyo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati
- Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat I Bagian Hukum Acara judul Sosialisasi Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat Di Desa Karangluhur, Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
- Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat II "Sosialisasi Lembaga Peradilan Di Indonesia dan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung "
- Interaksi Dosen dan Mahasiswa Untuk Pemberdayaan dan Pengembangan Desa Batch II Yang Dibiayai Selain APBN Undip Tahun Anggaran 2024 dengan

judul Penguatan Kesadaran Hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

- nteraksi Dosen dan Mahasiswa Untuk Pemberdayaan dan Pengembangan Desa Batch II Yang Dibiayai Selain APBN Undip Tahun Anggaran 2024 dengan judul Pendampingan Optimalisasi Pengolahan Sampah Plastik menjadi Kerajinan Tangan bagi Usaha Kecil Menengah di Kecamatan Sragi Pekalongan
- Rencana Aksi Perlindungan Konsumen Daerah: Manajemen Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahap 2SOSIALISASI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA DAN KONSULTASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN MANDING, KECAMATAN TEMANGGUNG, KABUPATEN TEMANGGUNG
- Penguatan Kesadaran Hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
- SOSIALISASI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA DAN KONSULTASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KEDU, KABUPATEN TEMANGGUNG
- Sosialisasi Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Konsultasi Hukum Kepada Masyarakat Di Desa Karangluhur, Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
- SOSIALISASI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA DAN KONSULTASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

Artikel Ilmiah & Publikasi

- Penguatan Regulasi Anti-SLAPP Dalam Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan di Indonesia — *YD Sukmadewi, E Pujiastuti, T Mulyani, S Supriyadi, KW Utama, (JURNAL USM LAW REVIEW 9 (1), 475-495), https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/13110*
- EKSISTENSI GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN — *KW Utama, (Jurnal Hukum Progresif 12 (1), 22-31), https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum*
- Environmental protection barriers in Indonesia in the form of Administrative Effort — *KW Utama, R Saraswati, A Putrijanti, YD Sukmadewi, (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1270 (1), 012019), https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1270/1/012019/pdf*
- Relevansi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Asas Kemanfaatan — *udhitiya Dyah Sukmadewi, Kartika Widya Utama, (Law, Development and Justice Review), https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/14054.*
- Harmonizing the Rules: “A Socio-Legal Analysis of FIFA Stadium Safety and Security Standards and Indonesian Football Regulations – Aftermath Kanjuruhan Tragedy" — *KWUtama, (Law Reform), https://scholar.undip.ac.id/en/publications/harmonizing-the-rules-a-socio-legal-analysis-of-fifa-stadium-safe/*
- Penguatan Regulasi Anti SLAPP dalam Perlindungan Hukum Aktivis Lingkungan di Indonesia — *YUDHITIYA DYAH SUKMADEWI, ENDAH PUJIASTUTI, TRI MULYANI, SUPRIYADI, Kartika Widya Utama, (2026), Jurnal USM Law Review*

- PENERAPAN DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN ANAK — *Kartika Widya Utama, Irma Cahyanintyas, (2025), Diponegoro Law Journal*
- PELAKSANAAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XII/2014 — *Kartika Widya Utama, Marjo, (2025), Diponegoro Law Journal*
- TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMERIKSAAN KASASI PERKARA PIDANA PADA SISTEM PERADILAN INDONESIA — *Sukinta, Kartika Widya Utama, (2024), Diponegoro Law Journal*
- Harmonizing the Rules: “A Socio-Legal Analysis of FIFA Stadium Safety and Security Standards and Indonesian Football Regulations – Aftermath Kanjuruhan Tragedy" — *Kartika Widya Utama, Aju Putrijanti, Lydia Apriliani, Yudhitiya Dyah Sukmadewi, (2024), Law Reform*
- ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN CILACAP NOMOR 159/PID.B/2021/PN CLP) — *Kartika Widya Utama, Sukinta, (2021), Diponegoro Law Journal*
- EKSISTENSI GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN — *Kartika Widya Utama, (2024), Jurnal Hukum Progresif*
- Implementation of the Principle of “Lex Specialis Derogate Legi Generalis” in Regulations on Administrative Measures of State Administrative Disputes (State Administrative Decision Case Study Number: 23/G/KI/2022/PTUN.SMG) — *Kartika Widya Utama, Maria Paulina Rosari Prayitno, (2022), International Journal of Social Science Research and Review*